

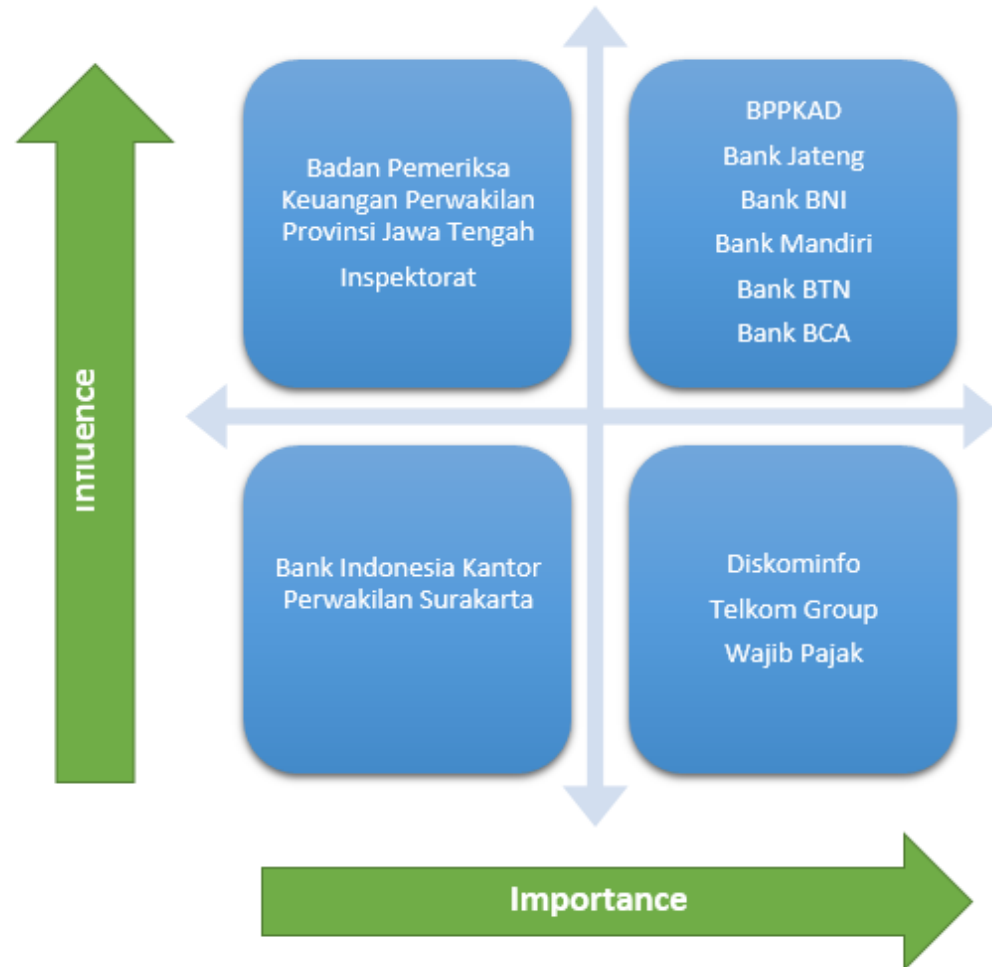


**BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KOTA SURAKARTA**



MATRIK DAN KETERLIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN SISTEM EPPSON

MATRIK DAN KETERLIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN SISTEM EPPSON



BPPKAD KOTA SURAKARTA

Menjadi titik pusat dari seluruh kepentingan terhadap pengembangan dan penerapan sistem EPPSON. BPPKAD Kota Surakarta bertanggungjawab untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi atas keberhasilan dalam pengelolaan pendapatan pajak daerah.

BANK JATENG

Sebagai Bank Persepsi terhadap Rekening Kas Umum Daerah dan sebagai Bank penerima pembayaran Pajak Daerah. Bank Jateng mempunyai kewajiban untuk melaporkan dana dan merekonsiliasi data penerimaan pajak setiap hari sebelum jam 10.00 WIB. Perjanjian Kerja Sama dengan Bank Jateng dapat dilihat pada link <https://bppkad.surakarta.go.id/mou/>

4 BANK MITRA (BNI, BANK MANDIRI, BTN, BCA)

Bank mitra menerima pembayaran pajak daerah melalui fasilitas channel perbankan yang dimiliki dan berkewajiban untuk melimpahkan dana pembayaran pajak dalam waktu 1 X 24 Jam ke RKUD Pemerintah Kota Surakarta. Perjanjian Kerjasama ini bisa dilihat lebih jelas di link berikut

- Bank Negara Indonesia (BNI)

<https://bppkad.surakarta.go.id/mou/>

<https://bppkad.surakarta.go.id/> >> video

- Bank Mandiri

<https://bppkad.surakarta.go.id/mou/>

<https://bppkad.surakarta.go.id/> >> video

4 BANK MITRA (BNI, BANK MANDIRI, BTN, BCA)

- Bank Tabungan Negara (BTN)

<https://bppkad.surakarta.go.id/mou/>

<https://bppkad.surakarta.go.id/> >> video

- Bank Central Asia (BCA)

<https://bppkad.surakarta.go.id/mou/>

<https://bppkad.surakarta.go.id/> >> video

DISKOMINFO KOTA SURAKARTA

Dinas Kominfo SP mendukung program EPPSON BPPKAD dengan menyiapkan sarana teknologi informasinya. Adapun teknologi informasi yang disiapkan meliputi :

- **HARDWARE**

Untuk hardware pendukung EPPSON yaitu alat monitoring pajak berupa *Terminal Monitoring Device* (TMD) dan *Cash Register* (CR) *online*, kedua alat ini berfungsi untuk memonitor pajak transaksi penjualan yang dilakukan Wajib Pajak dan mengirim hasil transaksinya ke server Dinas Kominfo SP secara otomatis. Jadi BPPKAD selaku pengelola pajak daerah bisa memonitor pajak transaksi yang dilakukan Wajib Pajak secara *real time*. Adapun jumlah TMD yang dipasang tahun 2019 sebanyak 200 alat, CS sebanyak 25 alat.

- **Virtual Private Server (VPS)**

VPS digunakan sebagai *payment gateway* pembayaran pajak BPPKAD dengan pihak bank yang bekerjasama serta sebagai basis data Pajak Daerah. Dengan adanya server ini, Wajib Pajak bisa melakukan pembayaran non tunai pajak daerah lewat Kasir, ATM, SMS banking, Internet banking.



DISKOMINFO KOTA SURAKARTA

- SOFTWARE

Untuk memudahkan pembayaran dan pemantauan pajak daerah, Dinas KOMINFO SP menyiapkan aplikasi bernama SOLO DESTINATION. Aplikasi berbasis *mobile berplatform* android dan IOS ini bisa di *download* gratis di playstore dan Apple Store.

Aplikasi ini berguna untuk bagi Wajib Pajak melakukan transaksi Pajak Daerah dalam satu genggam di dimanapun, kapanpun.

TELKOM GROUP

Pemangku Kepentingan ini mempunyai kompetensi secara profesional terhadap transaksi *online* dan mempunyai jaringan luas yang terkoneksi dengan banyak Bank Umum Nasional. Entitas ini memastikan proses transaksi berjalan lancar selama 24 jam dan melaporkan semua log data kepada BPPKAD Kota Surakarta. Link dapat dilihat pada <http://surakarta.simpasa.com>

WAJIB PAJAK

Pemangku kepentingan yang merasakan manfaat dari penerapan sistem EPPSON ini menggunakan semua layanan Pajak Daerah mulai dari Pelaporan, Pembayaran hingga mendapatkan notifikasi pembayaran Pajak Daerah secara mudah, cepat, transparan kapanpun dan dimanapun mereka berada.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROPINSI JAWA TENGAH

BPK melakukan fungsi pengawasan untuk melihat apakah penerapan sistem ini dapat dipertanggung jawabkan laporan keuangannya. Permintaan data dukung untuk pemeriksaan dapat dipenuhi dengan cepat dengan akurasi yang baik.

INSPEKTORAT KOTA SURAKARTA

Inspektorat menjalankan fungsinya sebagai pemeriksa internal dan merekomendasikan beberapa hal apabila ditemukan potensi kekurangan dan kesalahan dari penerapan sistem ini.

BANK INDONESIA KANTOR PERWAKILAN SURAKARTA

Menjadi Koordinator untuk mendorong keterlibatan bank HIMBARA dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Pajak Daerah dengan sistem transaksi non tunai .